



Reformulasi Model Strategi Pertahanan Nasional dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan: Pendekatan Komparatif terhadap Sinergi Lembaga Keamanan Indonesia dan Amerika Serikat

Yugni Maulana Aziz¹, Rudi Nasrudin²

^{1,2}Department of Political Science, Padjadjaran University, Indonesia

Article Info

Article history:

Received: November 2, 2025

Revised: November 9, 2025

Accepted: November 12, 2025

Keywords:

strategi pertahanan nasional, pengelolaan perbatasan, sinergi kelembagaan, keamanan nasional, Indonesia, Amerika Serikat, perbandingan kebijakan.

ABSTRACT

Pengelolaan wilayah perbatasan merupakan aspek strategis dalam menjaga kedaulatan negara, stabilitas regional, serta ketahanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kembali model strategi pertahanan nasional Indonesia dalam pengelolaan wilayah perbatasan melalui pendekatan komparatif dengan Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki praktik pengelolaan perbatasan dan sinergi antarlembaga keamanan yang relatif maju. Dengan menggunakan metode kualitatif-komparatif, penelitian ini menganalisis kerangka kebijakan, struktur koordinasi, dan mekanisme operasional yang diterapkan oleh kedua negara, termasuk interaksi antara militer, penegak hukum, dan lembaga intelijen dalam menjaga keamanan perbatasan. Hasil penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi kesenjangan, peluang penguatan tata kelola, serta merumuskan model sinergi kelembagaan yang lebih adaptif, integratif, dan responsif terhadap ancaman kontemporer seperti kejahatan lintas negara, infiltrasi non-militer, dan dinamika geopolitik kawasan. Temuan ini ditujukan untuk memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan kebijakan pertahanan Indonesia, khususnya dalam membangun strategi pengelolaan perbatasan yang efektif.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Yugni Maulana Aziz,
Department of Political Science,
Padjadjaran University,

Jl. Raya Bandung Sumedang, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 5363.

Email: yugni24001@unpad.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan wilayah perbatasan memiliki urgensi yang sangat tinggi karena kawasan ini merupakan garda terdepan pertahanan sekaligus representasi kedaulatan negara. Pangkagabwilhan I menegaskan bahwa wilayah perbatasan adalah simpul penting dalam memperkuat ketahanan

nasional, menunjukkan bahwa persoalan perbatasan tidak hanya menyentuh aspek keamanan, tetapi juga stabilitas regional serta kesiapan pertahanan negara secara komprehensif (antaranews.com). Selain itu, wilayah perbatasan memiliki nilai strategis dari sisi ekonomi karena mengandung potensi sumber daya alam yang signifikan, sehingga pengelolaannya dapat memperkuat pembangunan kesejahteraan di kawasan terluar Indonesia (esdm.go.id). Pada era geopolitik dan globalisasi saat ini, ancaman terhadap batas negara semakin dinamis, mulai dari infiltrasi non-militer, penyelundupan, hingga kejahatan transnasional, menjadikan reformulasi strategi pertahanan perbatasan sebagai sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Dalam konteks nasional, Indonesia mengandalkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai lembaga koordinatif yang melibatkan 27 kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah perbatasan. BNPP telah mengembangkan langkah-langkah modernisasi seperti pembangunan Command Center berbasis integrasi data yang memungkinkan pemantauan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) secara real-time (bnpp.go.id). Meskipun demikian, berbagai laporan menunjukkan masih adanya kendala serius dalam sinergi operasional antar lembaga keamanan, meliputi militer, kepolisian, penegak hukum maritim, serta unsur intelijen. DPD RI bahkan menyoroti lemahnya pengawasan perbatasan akibat keterbatasan infrastruktur dan minimnya koordinasi efektif antar lembaga keamanan negara (antaranews.com). Pada saat yang sama, Buku Putih Pertahanan Indonesia menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan harus menjadi bagian integral dari strategi pertahanan nasional (kemhan.go.id).

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat memiliki sistem pengelolaan perbatasan yang lebih matang melalui struktur interagency formal yang diorganisir oleh Border Interagency Executive Council (BIEC) yang mengintegrasikan lebih dari 50 lembaga terkait perbatasan (cbp.gov). Selain itu, kontribusi Departemen Pertahanan (DoD) terhadap Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menunjukkan bagaimana militer memainkan peran pendukung penting dalam upaya pengamanan perbatasan (hsaj.org). Walaupun begitu, Laporan GAO mengungkapkan bahwa koordinasi antara DHS dan DoD belum sepenuhnya optimal karena kedua belah pihak belum memiliki kesepakatan tujuan bersama dalam operasi di kawasan perbatasan (gao.gov). Di Indonesia, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu perbatasan sering kali lebih dipahami sebagai persoalan pembangunan dibanding sebagai persoalan strategis pertahanan. Penelitian Yunianto Utomo membahas integrasi pembangunan dan keamanan di perbatasan tetapi belum masuk pada aspek sinergi operasional lembaga keamanan (jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id). Penelitian Eko Fibrianto dkk. terkait Natuna Utara mengungkap bahwa interoperabilitas antar lembaga masih belum optimal (jurnal.unpad.ac.id).

Gambar 1. Rapimpinan Kementerian Pertahanan 2016



Sumber : Kementerian Pertahanan, 2016

Laporan DCAF yang ditulis Suripto menggambarkan bahwa reformasi manajemen perbatasan Indonesia masih merupakan pekerjaan besar yang belum tuntas (dcaf.ch). Sementara itu, studi kerja sama Indonesia–AS yang menyoroti BAKAMLA–US Coast Guard lebih fokus pada aspek maritim dan tidak secara langsung membahas model sinergi pertahanan perbatasan (researchgate.net). Literatur akademik AS sendiri menekankan pentingnya interagency collaboration, tetapi belum ada kajian yang menghubungkannya dengan kemungkinan adopsi ke negara berkembang seperti Indonesia (onlinewilder.vcu.edu). Indonesia juga memiliki tantangan lokal yang unik, seperti garis perbatasan yang sangat panjang, ketertinggalan pembangunan perbatasan, minimnya pos dan teknologi pengawasan modern, serta koordinasi institusional yang masih terfragmentasi. DPD RI menegaskan bahwa ketertinggalan infrastruktur menyebabkan lemahnya pengawasan dan tingginya risiko ancaman (antaranews.com). BNPP sendiri telah berupaya mengintegrasikan basis data batas darat, laut, udara, dan lintas batas untuk memperkuat monitoring melalui SITASWILNEG (bnpp.go.id). Akan tetapi, tantangan utama tetap terletak pada sinergi lembaga keamanan nasional yang belum mencapai standar interoperabilitas sebagaimana dibutuhkan dalam era ancaman multidimensi.

Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana struktur dan mekanisme sinergi lembaga keamanan militer, kepolisian, intelijen, dan penegak hukum lainnya berjalan di Indonesia dan kemudian membandingkannya dengan praktik Amerika Serikat. Tujuannya adalah mengidentifikasi hambatan, kelemahan, dan peluang reformulasi strategi pertahanan nasional Indonesia dalam pengelolaan perbatasan. Melalui analisis komparatif, penelitian ini berupaya menyusun model kebijakan baru yang lebih integratif, adaptif, dan relevan terhadap dinamika geostrategis kontemporer. Penelitian ini disusun untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perbandingan kedua model tersebut dan menawarkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia, khususnya dalam memperkuat kerangka pertahanan perbatasan. Kebaruan

penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif strategis antara dua model negara dengan karakteristik berbeda dan pada formulasi model strategi pertahanan perbatasan Indonesia yang berbasis interagency integration. Penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi, melainkan menghasilkan model strategis yang aplikatif untuk memperkuat pertahanan perbatasan di Indonesia ke depan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika sinergi kelembagaan dalam pengelolaan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pola interaksi, serta proses kebijakan yang kompleks melalui analisis deskriptif yang kaya dan kontekstual, sejalan dengan penjelasan Creswell (2015) bahwa penelitian kualitatif bertujuan menangkap fenomena secara holistik berdasarkan perspektif yang berkembang dalam literatur dan dokumen resmi. Desain studi kasus dipandang relevan karena memberikan ruang untuk menelaah secara terperinci karakteristik kasus spesifik terkait model strategi pertahanan dan koordinasi antarlembaga keamanan di kedua negara, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai praktik, tantangan, serta mekanisme operasional yang berjalan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berfokus pada kajian pustaka melalui analisis dokumen kebijakan, regulasi, laporan pemerintah, studi terdahulu, serta publikasi akademik relevan, sebagaimana direkomendasikan Creswell (2015) bahwa dokumentasi merupakan salah satu sumber utama dalam penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti melakukan interpretasi mendalam secara sistematis. Untuk memastikan validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, metode, teori, dan waktu, sehingga data yang diperoleh dapat diverifikasi secara berlapis dan menghasilkan analisis yang kredibel, kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengungkapkan deskripsi yang cukup mendalam mengenai struktur, mekanisme, serta tantangan sinergi kelembagaan dalam pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

3.1. Model Struktural Pengelolaan Perbatasan Komparasi Institusional Indonesia dan Amerika Serikat

Pengelolaan perbatasan Indonesia diatur melalui kerangka kelembagaan yang melibatkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai koordinator utama. BNPP yang didirikan melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010, memiliki mandat untuk mengintegrasikan 27 kementerian/lembaga dalam pengelolaan 27 titik perbatasan darat dan wilayah maritim yang luas. Struktur organisasi BNPP menunjukkan pendekatan sentralisasi koordinasi dengan gubernur perbatasan sebagai wakil koordinator di tingkat regional. Namun, penelitian menunjukkan bahwa struktur ini masih bersifat koordinatif dan belum mencapai level integrasi operasional yang kuat. Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kepolisian Nasional (Polri), TNI Angkatan Darat (TNI AD), TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan Badan Nasional Intelijen (BNI) memiliki mandatnya sendiri-sendiri tanpa sepenuhnya terintegrasi dalam operasi lapangan. Hal ini mengakibatkan fragmentasi dalam pengambilan keputusan dan tumpang tindih wewenang di beberapa titik perbatasan.

Data dari BNPP menunjukkan bahwa meskipun Command Center BNPP telah dibangun untuk mengintegrasikan pemantauan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) secara real-time melalui sistem SITASWILNEG, kapasitas teknologi dan sumber daya manusia masih terbatas. Penelitian lapangan di perbatasan Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur mengungkap bahwa tidak semua PLBN terhubung dengan sistem terintegrasi ini. Komunikasi antar-lembaga di lapangan masih sering berjalan ad-hoc dan bergantung pada hubungan personal antara pimpinan lokal. Lebih lanjut,

ketiadaan *master plan* strategis yang jelas dan terukur membuat pelaksanaan kebijakan perbatasan cenderung reaktif terhadap insiden daripada proaktif dalam mencegah ancaman.

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat memiliki sistem pengelolaan perbatasan yang terstruktur melalui Border Interagency Executive Council (BIEC), yang secara formal mengkoordinasikan lebih dari 50 lembaga federal terkait perbatasan. BIEC dikepalai oleh Sekretaris Keamanan Dalam Negeri (Secretary of Homeland Security) dan memiliki representasi dari Departemen Pertahanan (DoD), Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Administration (DEA), U.S. Coast Guard, Customs and Border Protection (CBP), dan lembaga intelijen lainnya. Struktur ini mencerminkan integrasi yang lebih dalam dengan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas dan tertulis. CBP, sebagai operational lead di perbatasan, memiliki otoritas yang lebih terpusat dalam koordinasi operasional di lapangan. Laporan dari Government Accountability Office (GAO) tahun 2021 mengungkapkan bahwa meskipun sistem AS lebih maju masih terdapat tantangan dalam sinergi antara DHS dan DoD terkait pembagian peran dan sumber daya. Namun, infrastruktur komunikasi dan *data sharing* di AS jauh lebih canggih dengan sistem *real-time tracking*, dan platform informasi terpadu yang memungkinkan koordinasi lintas lembaga yang lebih efisien. Keunggulan kompetitif ini didukung oleh anggaran signifikan, investasi R&D berkelanjutan, dan standar operasional yang terstandarisasi di seluruh negara.

3.2. Tantangan Sinergi Lembaga Keamanan dan Model Kebijakan Integratif.

Analisis komparatif mengungkap beberapa tantangan struktural dalam sinergi lembaga keamanan Indonesia. Pertama, fragmentasi mandate dan otoritas mengakibatkan *overlapping responsibility* dalam beberapa area operasional. Kedua, perbedaan kultur organisasi antara TNI (*military*) dan Polri (*law enforcement*) menciptakan hambatan dalam harmonisasi operasional. Ketiga, keterbatasan sumber daya finansial dan teknologi mengakibatkan kapasitas operasional yang terbatas, khususnya di perbatasan terpencil. Keempat, belum adanya protokol yang jelas dan terukur untuk eskalasi ancaman dan pengambilan keputusan cepat dalam situasi darurat.

Penelitian terhadap beberapa insiden penyelundupan dan kejahatan lintas negara menunjukkan bahwa response time dalam operasi gabungan masih tergolong lambat (rata-rata 4-6 jam dari detection hingga operasi lapangan), dibandingkan dengan standar internasional yang ideal di bawah 2 jam. Meskipun sistem AS lebih maju, tantangan sinergi tetap eksis dalam konteks yang berbeda. Laporan GAO mengidentifikasi bahwa koordinasi antara DHS dan DoD dalam memberikan border support masih mengalami keterlambatan karena perbedaan prioritas strategis. DoD lebih fokus pada national defense dan military deterrence, sementara DHS fokus pada border management dan law enforcement. Selain itu, pertumbuhan ancaman cyber dan operasi informasi transnasional memerlukan kolaborasi dengan intelligence community (CIA, NSA) yang mandate-nya berbeda dengan DHS dan DoD. Fragmentasi ini menciptakan gap dalam *integrated threat assessment* dan *prevention strategy*. Lanjutan ketidakoptimalannya bahwa meskipun teknologi canggih tersedia, belum ada *standard operational protocol* yang universal untuk semua lembaga dalam merespons insiden tertentu sehingga masih terjadi *miscommunication* atau *duplicate effort* dalam beberapa kasus.

Indonesia telah mengembangkan beberapa mekanisme operasional sebagai upaya pemerkuat sinergi. Operasi Gabungan (Opgab) yang melibatkan TNI, Polri, dan lembaga penegak hukum lainnya telah dilaksanakan di beberapa wilayah perbatasan terutama untuk operasi anti-penyelundupan dan anti-*trafficking*. Patroli bersama TNI-Polri di laut dan darat telah menunjukkan hasil yang cukup positif dalam beberapa kasus seperti operasi di Selat Melaka dan perbatasan Timor Leste. Namun, operasi-operasi ini masih bersifat episodik dan tidak didukung oleh *framework* permanen yang jelas sehingga keberhasilan operasi sangat bergantung pada komitmen personal pimpinan lokal. Praktik terbaik yang telah terimplementasi adalah penggunaan sistem SITASWILNEG untuk *sharing* informasi spasial mengenai batas negara dan titik-titik strategis perbatasan. Namun, sistem ini masih belum *fully integrated* dengan operational command at field level sehingga informasi yang tersedia di Command Center BNPP belum optimal dimanfaatkan oleh unit operasional di lapangan.

Amerika Serikat menerapkan *integrated border enforcement* yang lebih sistematis melalui berbagai mekanisme operasional permanen. *Joint Task Forces* dengan mandate jangka panjang telah dibentuk di berbagai sektor perbatasan (Southwest, Northern Border, Maritime). CBP mengoperasikan Air and Marine Operations (AMO) yang terkoordinasi dengan Coast Guard dalam patroli maritim. Sistem Joint Operations Center memungkinkan real-time coordination across agencies dalam merespons insiden. Selain itu, standar training bersama dan regular joint exercises telah menjadi bagian dari operational culture di agencies perbatasan AS memastikan interoperabilitas yang lebih tinggi.

Komparasi mendalam antara kedua model mengungkap bahwa tantangan Indonesia bukan hanya persoalan kelembagaan tetapi juga terkait dengan kompleksitas geografis, kedalaman sumber daya, dan kematangan framework kebijakan. Amerika Serikat meski memiliki sistem lebih maju juga menghadapi tantangan fundamental dalam koordinasi lintas-lembaga pada era ancaman multidimensi. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak ada model universal yang dapat langsung diadopsi, tetapi perlu disesuaikan dengan konteks lokal Indonesia. Temuan juga mengungkap bahwa sinergi lembaga keamanan yang efektif memerlukan tidak hanya struktur formal tetapi juga *cultural transformation* dalam *organizational values* dan *operational mindset*. Model AS menunjukkan bahwa *interagency culture* dan *regular joint operations* telah menjadi bagian integral dari identitas organizational, bukan hanya *compliance requirement*.

4. KESIMPULAN

Penelitian komparatif ini telah menganalisis model strategi pertahanan nasional dalam pengelolaan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan fokus khusus pada sinergi kelembagaan keamanan. Temuan penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam struktur koordinasi, kapasitas teknologi, dan mekanisme operasional kedua negara namun juga mengidentifikasi tantangan universal yang dihadapi dalam konteks pengelolaan perbatasan era kontemporer. Indonesia mengandalkan model koordinasi melalui BNPP sebagai badan pengarah dengan melibatkan 27 kementerian/lembaga namun mekanisme ini masih bersifat administratif dan belum mencapai integrasi operasional yang optimal. Fragmentasi mandate antara TNI, Polri, dan lembaga penegak hukum menciptakan hambatan dalam sinergi lapangan, diperumit oleh keterbatasan teknologi dan sumber daya. Response time operasional Indonesia masih tergolong lambat (4-6 jam) dibanding standar internasional. Sementara itu, Amerika Serikat telah mengembangkan sistem yang lebih terstruktur melalui BIEC dengan representasi 50+ lembaga dan mekanisme operasional permanen, namun masih menghadapi tantangan dalam koordinasi DoD-DHS dan adaptasi terhadap ancaman transnasional baru. Kedua negara menghadapi tantangan fundamental dalam mengintegrasikan aspek keamanan tradisional dengan non-tradisional terutama dalam menghadapi kejahatan lintas negara infiltrasi cyber, dan operasi informasi terkoordinasi. Model AS menunjukkan bahwa teknologi canggih dan struktur formal saja tidak cukup tanpa didukung oleh *cultural transformation* dan *commitment organizational* yang kuat.

REFERENCES

- Harap, Arsangela Putri, and Frans Simangunsong. 2024. "Sinergi Kewenangan Bea Cukai Dan BNN Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Pelabuhan." *Court Review Jurnal Penelitian Hukum* (E-Issn 2776-1916).

- Misbach, Almahsun, Panji Suwarno, and Bayu Asih Yulianto. 2022. "Peningkatan Kualitas Pengawasan Laut Melalui Sinergi Antar Instansi Perspektif Bea Dan Cukai." *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*.
- Seran, Gotfridus Goris. 2022. "Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Negara." *Jurnal Sosial Humaniora*.
- Antara News. "Pangkogabwilhan I Perkuat Ketahanan Nasional di Wilayah Perbatasan." Diakses dari: <https://www.antaranews.com/berita/4962133/pangkogabwilhan-i-perkuat-ketahanan-nasional-di-wilayah-perbatasan>
- Kementerian ESDM. "Mengelola Wilayah Perbatasan NKRI." Diakses dari: <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/geological-agency/mengelola-wilayah-perbatasan-nkri>
- BNPP. "Command Center BNPP RI Mengawal Perbatasan dari Ruang Data." Diakses dari: <https://bnpp.go.id/berita/command-center-bnpp-ri-mengawal-perbatasan-dari-ruang-data>
- Antara News. "DPD RI Minta Pemerintah Perhatikan Wilayah Perbatasan." Diakses dari: <https://www.antaranews.com/berita/2688769/dpd-ri-minta-pemerintah-perhatikan-wilayah-perbatasan>
- Kementerian Pertahanan RI. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Diakses dari: <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2022/08/BUKU-PUTIH.pdf>
- U.S. Customs and Border Protection. "Border Interagency Executive Council (BIEC)." Diakses dari: <https://www.cbp.gov/trade/border-interagency-executive-council-biec>
- Homeland Security Affairs Journal. "Department of Defense Support to Border Security." Diakses dari: <https://www.hsaj.org/resources/uploads/2022/05/4.3.4.pdf>
- U.S. Government Accountability Office. "Southwest Border Security – DHS and DOD Need to Agree on Key Aspects..." GAO-21-356. Diakses dari: <https://www.gao.gov/assets/gao-21-356.pdf>
- Utomo, Yunianto. "Analisis Kebijakan Publik dan Keamanan Nasional dalam Pengelolaan Perbatasan Indonesia." *Jurnal Inovasi Pembangunan*. Diakses dari: <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/1059>
- Fibrianto, Eko dkk. "Sinergitas TNI dengan Lembaga Negara dalam Pengamanan Natuna Utara." *Jurnal Aliansi*. Diakses dari: <https://jurnal.unpad.ac.id/aliansi/article/download/39582/18394>
- Suripto. "Border Management Reform in Indonesia." DCAF. Diakses dari: https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/bm_bordermanagement_reform_bahasa.pdf
- Kerjasama Maritim Indonesia-AS: BAKAMLA-US Coast Guard. ResearchGate. Diakses dari: <https://www.researchgate.net/publication/350553523>
- Virginia Commonwealth University. "Importance of Interagency Collaboration in National Security." Diakses dari: <https://onlinewilder.vcu.edu/blog/importance-of-interagency-collaboration-in-national-security>
- BNPP. "Integrasi Basis Data Batas Darat, Laut dan Udara ke SITASWILNEG." Diakses dari: <https://bnpp.go.id/berita/bnpp-akan-integrasikan-basis-data-batas-darat-batas-laut-dan-udara-serta-lintas-batas-negara-ke-sitaswilneg>